

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Agus Sardjono, *et.al.*, *Pengantar Hukum Dagang*, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Ctk. Pertama, Permata Aksara, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Hernol Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ctk. Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.

- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Tim DPPAI, *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati*, Edisi Revisi, Ctk. Pertama, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI), Yogyakarta, 2013.
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2011.

Jurnal

- Ridwan Khairandy, "Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK/001989.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI/2011.
Fatwa Mahkamah Agung bernomor WKMA/Yud/20/VIII/2006.

Data Elektronik

Ahmad Mustofa, *Ilmu Dasar Budaya*, dikutip dari <http://suefmat.blogspot.co.id/2012/12/islam-dantanggungjawab.html?m=1>. Diakses terakhir tanggal 7 Desember 2012.

Bismar Nasution, “*Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan,*” terdapat dalam <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23>. Diakses terakhir tanggal 16 September 2015, jam 21.30.

Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Dasar Budaya*, <http://suefmat.blogspot.co.id/2012/12/islam-dantanggungjawab.html?m=1>. Diakses terakhir tanggal 7 Desember 2012.

Erman Rajagukguk, *Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara; KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN*, terdapat dalam <http://www.ermanhukum.com/dokumen/Keuangan%20BUMN%20bukan%20Keuangan%20Negara.pdf>.

Widagdho, Djoko, *Ilmu Budaya Dasar*, dikutip dari <http://ekookeg.blogspot.co.id/2014/01/islam-dan-tanggungjawab.html?m=1>. Diakses terakhir tanggal 07 Januari 2014.

<https://ervakurniawan.wordpress.com/2012/02/05/tanggung-jawab-dalam-islam/>
Diakses terakhir tanggal 5 Februari 2012, 1.34 WIB.

<http://m.tempo.co/read/news//2015/12/18/063728989/kpk-tetapkan-rj-lino-sebagai-tersangka>. Diakses terakhir tanggal 18 Desember 2015, 19.50 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt569dd9a34fc30/rj-lino--kesalahan-saya--membuat-perusahaan-terlalu-kaya>. Diakses terakhir tanggal 19 Januari 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/05/19171521/Pengacara.RJ.lino.Sebut.Tak.Ada.Masalah.dengan.Penunjukan.Langsung>. Diakses terakhir tanggal 5 Februari 2016, 19.17 WIB.

<http://www.lkdi.org/cms/wp-content/uploads/2011/09/Board-Duties-Indonesia.pdf>.

Sumber Lain

Erman Rajagukguk, Keterangan Disampaikan dalam Persidangan *Pengujian Pasal 2 Huruf G Dan I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Dan undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 26 Agustus 2013.

